



Strategi Penanganan Kemiskinan Tepat Kebutuhan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana melanjutkan strategi intervensi penanganan kemiskinan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 pada tahun depan.

"Jadi tidak asal memberikan bantuan atau membuat pelatihan-pelatihan. Intervensi program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Jumat (17/12).

Dengan demikian, Heroe berharap in-

tervensi program penanganan kemiskinan yang dilakukan mampu memberikan hasil yang lebih optimal karena laju pengentasan kemiskinan di masa pandemi tidak berjalan cepat seperti saat sebelum pandemi.

Menurut dia, berbagai program intervensi pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta ditujukan untuk memastikan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan akibat pandemi Covid-19.

"Jika masyarakat membutuhkan pelatihan wirausaha, maka diberikan pelatihan yang sesuai. Tetapi jika kebutuhannya untuk bekerja, maka dilaku-

kan intervensi yang sesuai," katanya.

Ia pun meminta tim pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah untuk bisa melakukan pendataan terkait warga miskin dan kebutuhan program intervensi.

Pada 2020, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta bahkan sempat naik 0,4 persen akibat pandemi menjadi 7,27 persen dan diharapkan bisa turun menjadi 7,1 persen.

"Beberapa warga yang sebelumnya sudah tidak lagi masuk data warga miskin dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) kembali masuk dalam data," katanya.

Meskipun demikian, Heroe menyebut kenaikan angka kemiskinan tersebut tidak terlalu besar jika dibanding kabupaten lain di DIY yang mengalami kenaikan 1 sampai 2 persen.

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, jumlah warga miskin yang masuk dalam data KSJPS 2021 tercatat sebanyak 15.584 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut meningkat 8,53 persen dibanding data 2020.

Pada tahun ini, tidak dilakukan pendataan KSJPS sehingga pelaksanaan program jaring pengaman sosial akan tetap mengacu pada data 2021. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005